Implementasi Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan tidak sehat
Sebagai Sumbangsih Dalam Pembangunan Di Indonesia

Oleh: Azwar Pakaya

Abstract

Economics crisis affecting at crisis in all areas, started from practice of indisposed economic activity. Competition faced by economic perpetrator in 21th century is competition in global area.

In order to growing and extends economics concept that prohibiting of practices of indisposed monopolies and emulation to all national entrepreneur implemented as according to nationality economics theme, its will be face to faces with various challenges and constraint. The Constraint or challenge is inter alia, in the form: Firstly, continuously corruption, collusion and nepotism (KKN). Second, collection bureaucracy. Third, dependency at credit. Fourth, overseas debt. Fifth, international and domestic market.

With implementation of UU No. 5/1999 about Prohibition Of Monopoly Practices and Emulation of Indisposed Business and UU No 8/1999 about Consumerism, hence pushing the business perpetrator for trying competitively in corporate world and consumer will not sacrificed.

Kata Kunci: Hukum, Anti Monopoli, Persaingan Tidak Sehat, Pembangunan.

Pendahuluan

Dalam perkembangan dunia ekonomi saat ini, ada dua isu penting yang kiranya menarik untuk dikaji dan dibahas, yakni praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, yang keduanya merupakan permasalahan dunia ekonomi yang seharusnya mendapat tempat tersendiri dalam pengaturan hukum kita. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan globalisasi, di mana sustu sistem ekonomi suatu negara akan terdesak atau kalah bersaing dengan negara lain, atau dengan bahasa sederhananya ekonomi suatu negara akan dipengaruhi dan mempengaruhi ekonomi suatu negara lain atau bahkan ekonomi dunia.

Masih segar dalam ingatan kita bagaimana perekonomian kita di zaman orde lama dan orde baru yang sangat tergantung pada bantuan negara-negara yang ada di dunia, termasuk Belanda, Jepang, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Impas dari ketergantungan tersebut adalah tekanan-tekanan dalam berbagai bidang termasuk bidang tata negara, bidang politik sampai penentuan kebijakan ekonomi Indonesia kedepean yang diberikan oleh negara-negara yang memberikan bantuan kepada Indonesia. Hasilnya adalah negara Indonesia tidak
berdaya terhadap intervensi yang diberikan negara-negara yang selalu setiap saat memberikan bantuananya kepada Indonesia.

Puncaknya ketika tahun 1998 terjadi krisis ekonomi global, negara-negara yang tadinya memberikan bantuan ke Indonesia, akhirnya menarik diri dan tidak bersedia lagi memberikan bantuan ke Indonesia. Akibatnya negara Indonesia yang sudah terbiasa dengan bantuan tersebut mengalami kegundangan ekonomi yang luar biasa dan berimpas pada proses pergantian rezim kekuasaan dari orde baru ke era reformasi.

Sesungguhnya kalau kita renungkan bahwa krisis yang ekonomi yang berdampak pada krisis di segala bidang, tidak lain diawali dari praktek kegiatan ekonomi yang tidak sehat. Dapat dikatakan bahwa ketergantungan pada suatu negara atau beberapa negara lain merupakan suatu peluang ke arah bisnis ekonomi yang tidak baik. Hal ini terjadi karena pelaku ekonomi hanya itu-itu saja, dan sudah pasti akan menimbulkan tingkat egoisme yang tinggi atau praktek monopoli yang pada akhirnya berimbas ke dunai persaingan ekonomi yang tidak sehat.


Harus diakui bahwa kompetisi yang dihadapi pelaku ekonomi di abad ke 21 adalah kompetisi yang serba global. Bahkan dapat dikatakan perekonomian di dalam negari saja, seperti pasar-pasar domestik di muka bumi, menjadi bagian dari pasar global, karena menang atau kalahnya produk dalam pasar tersebut terkait dengan persaingan yang terjadi di pasar global, termasuk penentuan harga yang sudah mengacu harga global. Akibatnya organisasi bisnis paling kecilpun menuntut pengelolaan kelas global pula.


Politik hukum ekonomi kita haruslah mengacu pada rumusan Pasal 33 UUD 1945, di mana di jelaskan bahwa perekonomian di susun berdasar
asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan masyarakat dikuasai oleh negara, serta semua kekayaan alama dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut dapat dikatakan sebagai usaha untuk menciptakan negara kesejahteraan. Dengan kata lain sistem liberal bukanlah sistem yang dipakai atau dianut oleh negara Indonesia.

**Hakekat Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, disebutkan bahwa monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Sementara dalam Kamus Black’s Law Dictionary secara detail menegaskan bahwa *monopoly is privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry out on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity.*

Menurut Rahayu Hartini (2006: 189), praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pada dasarnya, apabila dicermati bahwa suatu praktik monopoli tersebut harus dibuktikan adanya unsur mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum (Suherman, 2005: 87).

Sementara yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara atau tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Hartini, 2006: 190).


Pertama, Kegiatan monopoli. Dalam hal ini pelaku usaha dilarang melakukan praktik monopoli karena akan menimbulkan persaingan tidak sehat, mengendalikan harga seenaknya, yang akhirnya konsumen akan terabaikan. Dalam UU No 5 tahun 1999 telah dirumuskan beberapa kriteria kegiatan monopoli yakni:

1) pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2) pelaku usaha yang diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
   a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subsitusinya;
   b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama;
   c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kedua, kegiatan monopsoni. Dalam ketentuan Pasal 18 UU No 5 tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopsoni, yaitu:

1) Pelaku usaha dilarang melakukan, menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana di maksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Ketiga, kegiatan penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lain yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berupa:

1) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
2) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha persaingan itu;
3) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan;
4) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu (Pasal 19 UU N 5 tahun 1999).

Keempat, kegiatan persekongkolan. Beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh undang-undang adalah sebagai berikut:
1) pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
2) pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dikelasifikasikan rahasia perusahaan;
3) pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun kecepatan waktu yang dipersyaratkan.

Tantangan Pemerintah Di era Reformasi

Konsep kepentingan nasional pada era reformasi wajib dituangkan dalam butir-butir kebijakan (policy) yang lebih transparan dan menampung aspirasi publik secara lebih luas (Drajat, 2001: 9). Apa yang terjadi dalam kurun waktu 64 tahun Indonesia merdeka merupakan eksperimentasi dari berbagai tafsir ekonomi yang terkadang condong kepada etatisme dan dalam kesempatan lain condong free market economy. Dengan demikian dapat dikatakan pemimpin kita telah gagal dalam merumuskan sistem ekonomi Pasal 33 UUD 1945.

Pada zaman era baru mengklaim bahwa apa yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi pada saat itu merupakan pengejawantahan dari sistem ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam kurun waktu lebih kurang 30 tahun era baru berkuasa, sistem ekonomi kita dijalankan dengan tafsiran kepada free market economy yang di sana sini di subversi oleh distorsi berupa korupsi, kolusi dan nepotisme. Persaingan ekonomi di dorong, tetapi lisensi khusus dan intervensi negara juga terjadi, sehingga tatanan ekonomi negara menjadi rapuh tidak berdaya. Ekonomi dijalankan oleh kelas pengusaha yang berusaha berkompetisi dengan fair, tetapi sekaligus berhadapan dengan kelas pengusaha yang menggurita secara menakjubkan karena proteksi, lisensi, dan fasilitasi khusus seperti yang kita lihat pada sektor perminyakan, telekomunikasi, otomotif, semen dan cengkik, transportasi, infrastruktur dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal itu, maka Todung Mulya Lubis (2001: 21), menyatakan zaman orde baru yang berkuasa pada waktu itu dapat dikatakan pembangunan ekonomi telah dijadikan sebagai panglima. Untuk atas nama pembangunan ekonomi, stabilitas dalam artian keamanan dan ketertiban menjadi persyarat mutlak. Kebijakan yang refresif menjadi suatu hal yang bergandengan dengan pembangunan
ekonomi, dan dalam konteks ini dominasi militer menjadi instrumental.

Melihat kenyataan yang ada di mana paket deregulasi hukum yang dikeluarkan selama ini menunjukkan konsep reformasi ekonomi justru semakin tidak jelas. Deregulasi hukum yang dikeluarkan tergantung pada kebutuhan pasar, tetapi sering pula tergantung pada kepentingan bisnis sekelompok orang tertentu yang bisa saja punya hubungan dengan pemilik kekuasaan.

Kesemarawut dalam paket deregulasi hukum yang terjadi, namun kenyataannya tetap saja telah membawa pemerintah untuk meratifikasi berbagai traktat internasional mengenai ekonomi seperti GATT, GATS, TRIMs dan TRIPs sebagai tindak lanjut dari keanggotaan Indonesia pada WTO. Sebelumnya telah diratifikasi berbagai konvensi seperti patent cooperation treaty, berne convention dan New York convention yang pada dasarnya bertujuan untuk meliberalkan sistem ekonomi dan menjadikan negara ini sebagai bagian dari pasar bebas global.

Dalam menumbuhkan dan memperluas konsep ekonomi yang mendorong praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat bagi para pengusaha nasional sesuai dengan tema ekonomi kerakyatan, akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi. Kendala atau tantangan tersebut antara lain, berupa: Pertama, lingkungan KKN yang terus menerus bertahan dan diperbaharui di dalam tubuh negara. Kedua, sudah menjadi pengetahuan umum, baik usaha koperasi maupun usaha kecil dan menengah sejauh ini tak terbatas dari pergumulan kasus-kasus korupsi, ataupun menghadapi masalah birokrasi pungutan. Melebarinya lingkungan KKN menjadi perintah bagi peneguhan ekonomi kerakyatan yang tak memiliki aparat kepolisian atau kejaksaan untuk menyabu bersih KKN, baik ditubuh koperasi maupun yang dihadapi usaha kecil dan menengah.


Kenyataannya bahwa struktur dunia usaha kita sangat didominasi oleh perusahaan berskala besar dan raksasa. Hal ini tidak lain karena ada kedekatan dengan pengambil kebijakan yakni pemegang kekuasaan.

Kualitas Hukum Yang Diperlukan

Ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa ke depan ada 3 (tiga) faktor yang sangat potensi

Ade Maman Suparman (2005: 52), menyatakan bidang hukum persaingan usaha di Indonesia relatif masih baru, jika dilihat dari substansi memiliki karakteristik yang unik, tidak hanya ditujukan bagi kepentingan konsumen juga terciptanya efisiensi ekonomi melalui penciptaan dan pemeliharaan iklim yang kondusif.


Pemerintah paling tidak memberikan respon positif dalam bidang perekonomian bahkan tidak bersifat sepihak, artinya pemerintah terlalu ikut campur dalam memberikan berbagai fasilitas kemudahan bahkan pelaku usaha seringkali dimanfaatkan. Akibatnya banyak pelaku usaha melakukan praktek-praktek monopoli dalam melakukan kegiatan usaha, sekaligus konsumen kurang mendapat perlindungan.


Pada asasnya untuk melihat dan mengukur kualitas hukum yang dihasilkan oleh pemerintah menghadapi praktek ekonomi, maka dua paket kebijakan perundang-undangan yakni UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi toluk ukur penilaian.

Ketika suatu negara memasuki tahap negara kesejahteraan, tuntutan terhadap intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi kepentingan yang lemah sangatlah kuat (Rajagukguk, 2000: 14). Pada periode ini negara mulai memperhatikan antara lain kepentingan tenaga kerja, konsumen, usaha kecil dan lingkungan hidup (Fishman, 1989: 7-9).

Di Indonesia intervensi pemerintah melalui hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari implementasi negara kesejahteraan, karena UUD 1945 di
samping sebagai konstitusi politik juga
disebut konstitusi ekonomi, yaitu
konstitusi yang mengandung ide negara
ekesejahteraan yang tumbuh dan
berkembang karena pengaruh
sosialisme sejak abad ke 19.

Penghapusan monopoli secara
ekesaruhan bukanlah pekerjaan
mudah, karena pelaku usaha yang biasa
dimanaaka akan mengalami proses
panjang untuk tidak berlaku
monopolistik. Dalam hal monopoli
posisi konsumen menjadi rentan
dengan pelaku usaha. Ketika pelaku
usaha menempati posisi sebagai pihak
yang dibutuhkan dari pada konsumen,
terbuka peluang besar bagi pelaku
usaha untuk merugikan konsumen
melalui penyelahgunaan posisi
monopolistik.

Meskipun dalam prespektif
perjalanan waktu yang cukup panjang
dua pranata hukum diatur dalam
peraturan yang berbeda. Tetapi sebagai
payung hukum khususnya menyangkut
konsumen haruslah berpikir pada
undang-undang perlindungan
konsumen. Kehadiran undang-undang
perlindungan konsumen sangat penting
untuk mendukung hal tersebut, dengan
tujuan pokoknya adalah meningkatkan
harkat dan martabat konsumen.

Kehadiran UU No 8 tahun
1999 membawa dampak positif yakni
untuk mendukung dan meningkatkan
harkat dan martabat konsumen, yang
pad intinya menawarkan dua strategi
dasar untuk mencapainya yakni di satu
sisi melalui upaya pemberdayaan
konsumen, yang ditempus dengan cara
meningkatkan pengetahuan, kesadaran
kepedulian, kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk
melindungi dirinya sendiri, sedangkan
di sisi lain ditempuh melalui upaya
untuk menciptakan dan mendorong
iklim usaha yang sehat.

Ketika UU No 5 tahun 1999 di
godok dan dibahas di DPRD RI, yang
berkembang pada saat itu di
masyarakat adalah perasaan anti pelaku
yang monopoli. Untuk itu ada
keinginan agar ekonomi pasar
berlangsung, tetapi di lain pihak ada
keinginan masyarakat dan DPR bahwa
pemerintah harus melakukan
intervensi. Berkembang pada saat itu,
salah satu kendala utama eksternal
yang dihadapi UU No 5 tahun 1999
adalah bagaimana mengsinkronisasikan
antara keinginan ekonomi pasar dan
ekonomi yang harus diintervensi.

Sementara di sisi lain
menunjukkan pada saat undang-undang
ini di susun sikap nasionalisme yang
muncul berhadapan dengan globalisasi,
sehingga undang-undang perlu
kehadirannya. Pada saat kehadiran
undang-undang itu, diakui ada sikap
pertentangan antara nasionalisme
dengan globalisasi yang
mempersoalkan tentang kedaulatan
negara (Silalahi, 1999: 34).

Secara logika dalam menilai
suatu ketentuan undang-undang apakah
dapat dilaksanakan atau tidak,
pengalaman mengajarkann kepada kita
semua bahwa kebanyakan undang-
undang di Indonesia mungkin saja baik
secara teori, namun ketika dihadapkan
pada tahapan penegakan hukum,
undang-undang tersebut tidak dapat
menerobos kendala yang penuh dengan
ketidakpastian.

Kehadiran UU No 5 tahun
1999 membawa dampak positif lain
yakni terciptanya pasar yang tidak
mengenal perbedaan, sehingga peluang
usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasukan produk yang lebih baik dan kompetitif. Hal ini berarti bahwa secara tidak langsung kehadiran UU No 5 tahun 1999 akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang bersaing, dan pelayanan yang lebih baik.


Penutup

Berdasarkan pada pengalaman krisis ekonomi tahun 1998, rasanya kita sepakat bahwa apapun sistem dan model ekonomi yang kita akan pakai, pembangunan ekonomi kita harus didasarkan dan tergantung antara lain pada dua hal pokok yakni praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Kedua hal yang pokok ini sepanjang masih berlaku di Indonesia maka cita-cita untuk mewujudkan asas kekeluargaan rasanya sangat sulit diwujudkan.

Dengan berlakunya UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan di tambah juga kehadiran dari UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha untuk selalu berusaha secara kompetitif dalam dunia usaha dan tidak akan mengorbankan pihak konsumen. Hal-hal yang pernah terjadi dalam praktek di masa lalu terutama dalam hal monopoli diharapkan tidak akan terjadi lagi.

Kehadiran UU No 5 tahun 1999 ditujukan untuk memberikan jaminan dalam proses persaingan, maka pelaku usaha harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, jika tidak praktek yang pernah terjadi di masa lalu akan terulang kembali. Konsekuensi dari hal tersebut akan menyebabkan kualitas hukum dari UU No 5 tahun 1999 tersebut tidak ada jaminan kepastian hukum, keadilan dan bahkan juga kemanfaatan. Dengan demikian cita-cita untuk mewujudkan dunia ekonomi yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip Pasal 33 UUD 1945 yakni asas kekeluargaan hanya akan menjadi keinginan di atas kertas.
Daftar Pustaka


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen